

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pandemi telah menewaskan banyak orang di seluruh dunia tahun 2020. Sekitar 6.000 kasus positif Covid-19 pada pertengahan April, dan lebih dari 600 kematian. Pandemi telah menyebabkan kematian dan kerusakan ekonomi, dengan nilai tukar dolar AS meningkat tajam. Dalam beberapa hari terakhir, 17.000 orang telah mendaftar ke milis kami. Masyarakat yang berkecimpung di lembaga keuangan non-perbankan juga terkena imbas dari situasi pandemi Covid-19 sehingga pemerintah melalui intervensi OJK mengeluarkan aturan/kebijakan pelonggaran pemberian kemudahan pembiayaan kepada debitur. Mulai Maret 2020, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah aturan dalam menanggapi penyebaran virus corona. Salah satu alasan mengapa PP No. penting adalah karena mengatur bagaimana bisnis beroperasi. 21 Tahun 2020 (PP 21/2020) tentang Penerapan PSBB dalam mempercepat penanganan Covid-19. Dalam PP 21/2020, PSBB mengacu pada pembatasan kegiatan khusus penduduk di daerah yang terindikasi penebaran Covid-19 tinggi guna menekan penyebaran virus tersebut.

Pemberlakuan PSBB di berbagai daerah telah membuat banyak bisnis penerapan WFH dalam penurunan portabilitas spesialis dan aktivitas perusahaan. Penurunan pergerakan modern mempengaruhi pameran suatu organisasi, dapat menyebabkan penurunan kesepakatan dan keuntungan, dan dapat menyebabkan kemalangan. Kemalangan yang dialami para pelaku bisnis ternyata juga berdampak pada perbankan yang terobsesi untuk memenuhi piutangnya. Jika situasi ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin banyak perusahaan yang tutup dalam waktu dekat. Oleh sebab itu pemerintah membuat kebijakan-kebijakan salah satunya adalah kebijakan pemerintah dalam penundaan pembayaran hutang pada masa pandemic terhadap *profitabilitas, liquiditas, kebijakan hutang dan free cash flow* di perusahaan sektor makanan & minuman yang ada di idx.

Profit adalah kapasitas organisasi untuk menghasilkan manfaat yang sesuai dengan kesepakatan, sumber daya absolut, dan nilai investor. Sesuai tinjauan Silitonga (2014), manfaat berdampak negatif pada strategi kewajiban perusahaan. Hasil ini menunjukkan bahwa produktivitas terkait erat dengan strategi kewajiban, khususnya semakin tinggi manfaat, semakin rendah strategi kewajiban. Ini mungkin karena perusahaan suka menggunakan pendapatan yang ditahan untuk mengatasi masalah-masalahnya daripada menggunakan kewajiban ketika mungkin akan menjadi produktif. Hasil ini sesuai dengan eksplorasi Murtiningtyas (2012) yang menunjukkan bahwa produktivitas mempengaruhi strategi kewajiban.

Likuiditas adalah kapasitas organisasi untuk memenuhi komitmen sementara saat jatuh tempo. Satu definisi lagi adalah kapasitas individu atau perkumpulan untuk memenuhi komitmen atau komitmen yang harus segera diselesaikan dengan sumber daya yang cair.

Penghasilan gratis adalah uang berlebih dari suatu organisasi yang dapat disebarluaskan kepada penyewa dan investor dan tidak digunakan untuk bisnis atau spekulasi. Untuk mengurangi pertaruhan kewajiban bab 11 ketika organisasi dalam kondisi mapan, organisasi berusaha untuk menguranginya dengan memanfaatkan pendapatan gratis untuk membayar kewajiban. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan bebas, semakin rendah strategi kewajiban organisasi. Hasil ini dapat diandalkan dengan penelitian oleh Junaidi (2012) yang menyatakan bahwa pendapatan gratis berdampak buruk pada strategi kewajiban, dan organisasi berada dalam situasi yang stabil selama tahun peninjauan, mencoba mengurangi pertaruhan bab 11. Beberapa kewajiban dikurangi dengan mendistribusikan gratis penghasilan untuk membayar kewajiban. Dari percakapan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa semakin tinggi pendapatan bebas organisasi, semakin rendah kewajibannya.

Menurut Amiryia dan Atmini (2008), pengembangan transaksi berdampak negatif pada strategi obligasi dan membuat perbedaan besar. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi dengan manfaat tinggi memiliki kapasitas pendanaan ke dalam yang tinggi.

Mengingat klarifikasi yayasan di atas, alasan pemeriksaan ini adalah untuk: Uji kebijakan secara empiris pemerintah dalam penundaan pembayaran hutang pada masa pandemi terhadap profitabilitas, liquiditas, kebijakan hutang dan FCF di sektor makanan dan minuman

Tabel 1.1

Daftar NPM, Rasio Lancar, Free Cash Flow, DER Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020 (Jutaan Rupiah)

| Perusahaan | Tahun | Profitabilitas | | Liquiditas | | Free Cash Flow | | Debt Equity Ratio | |
|------------|-------|----------------|------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | laba bersih | penjualan | aktiva lancar | hutang lancar | aktivitas lancar | pengeluaran modal | total liabilitas | total ekuitas |
| CAMP | 2018 | 61.947 | 961.136 | 664.681 | 61.322 | 103.821 | 65.840 | 118.853 | 885.422 |
| | 2019 | 76.758 | 1.028.952 | 723.916 | 57.300 | 158.440 | 66.704 | 64.836 | 935.392 |
| | 2020 | 44.045 | 956.634 | 751.789 | 56.665 | 202.642 | 72.117 | 68.496 | 961.711 |
| CEKA | 2018 | 92.649 | 3.629.327 | 809.166 | 158.255 | 287.259 | 12.881 | 192.308 | 976.647 |
| | 2019 | 215.459 | 3.120.937 | 1.067.652 | 222.440 | 453.147 | 5.244 | 261.784 | 1.131.294 |
| | 2020 | 181.812 | 3.634.297 | 1.266.586 | 271.641 | 171.295 | 36.486 | 305.958 | 1.260.714 |
| DLTA | 2018 | 338.129 | 899.006 | 1.384.227 | 192.299 | 342.493 | 16.726 | 239.353 | 1.284.163 |
| | 2019 | 317.815 | 827.136 | 1.292.805 | 160.587 | 274.364 | 12.109 | 212.420 | 1.213.563 |
| | 2020 | 123.465 | 546.336 | 1.109.831 | 147.207 | 246.905 | 10.349 | 205.681 | 1.019.898 |
| INDF | 2018 | 4.961.851 | 73.394.728 | 33.272.618 | 31.204.102 | 5.935.829 | 7.236.247 | 46.620.996 | 49.916.800 |
| | 2019 | 5.902.729 | 76.592.955 | 31.408.445 | 24.686.862 | 13.344.494 | 4.463.812 | 41.996.071 | 54.202.488 |
| | 2020 | 8.752.066 | 81.731.469 | 38.418.238 | 27.975.875 | 13.855.497 | 194.004 | 83.998.472 | 79.138.044 |
| MYOR | 2018 | 1.760.434 | 24.060.802 | 12.647.858 | 4.764.510 | 459.273 | 671.673 | 9.049.161 | 8.542.544 |
| | 2019 | 2.051.404 | 25.026.739 | 12.776.102 | 3.726.359 | 3.303.864 | 1.898.334 | 9.125.978 | 9.911.940 |
| | 2020 | 2.098.168 | 24.476.953 | 12.838.729 | 3.475.323 | 3.715.882 | 1.155.601 | 8.506.032 | 11.271.468 |
| ULTI | 2018 | 701.607 | 5.472.882 | 2.798.521 | 635.161 | 575.823 | 335.504 | 780.915 | 4.774.956 |
| | 2019 | 1.085.865 | 6.241.419 | 3.716.641 | 836.314 | 1.096.817 | 243.066 | 952.283 | 5.655.139 |
| | 2020 | 1.109.666 | 5.967.362 | 5.599.421 | 2.327.339 | 1.217.063 | 401.835 | 3.972.379 | 4.781.737 |

Sumber : www.idx.co.id

Sesuai Tabel ditunjukkan bahwa Debt to Equity Ratio yang terjadi pada perusahaan makanan dan minuman menunjukkan kondisi stabil. Perusahaan dengan Debt Equity Ratio tinggi maka nilai resiko perusahaan makin tinggi. Perusahaan yang laba terus meningkat akan menentukan pilihan investor yang akan menanamkan modal ke perusahaan dengan tingkat pengembalian yang tinggi.

1.2 Teori Pengertian Dan Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Kebijakan Hutang danFree Cash Flow

1.2.1 Pengertian Dan Pengaruh Profitabilitas terhadap Kebijakan Pemerintahpenundaan pembayaran hutang

Menurut Kasmir (2014) ROA merupakan perbandingan dalam menilai keuntungan atau memprediksi laba pada periode tertentu.

Rumus yang dipergunakan yaitu:

$$\text{Return on Asset(ROA)} = \frac{\text{lababersih}}{\text{total asset}}$$

Pengaruh Profitabilitas terhadap Kebijakan Pemerintah penundaan pembayaran hutang

Menurut Aryanto dkk, (2021) Sejalan dengan hal itu, berdasarkan hasil penelitian Menunjukkan bahwa profitabilitas berkaitan erat dengan kebijakan utang. Dengan kata lain, semakin tinggi profitabilitas, semakin rendah kebijakan utang

H1 : Profitabilitas berpengaruh terhadap Kebijakan Pemerintah pada penundaan pembayaran hutang

1.2.2. Pengertian Dan Pengaruh Liquiditas terhadap Kebijakan Pemerintahpenundaan pembayaran hutang

Menurut Kasmir (2014), Liquiditas merupakan indikator keefektifan perusahaan sehingga mampu menuntaskan kewajibannya, memungkinkan perusahaan memenuhi kewajibannya pada saat tenggat waktu tercapai.

Rumus yang digunakan untuk rasio liquiditas:

$$\text{Rasio Lancar} = \frac{\text{asetlancar}}{\text{kewajibanlancar}}$$

Pengaruh Liquiditas terhadap Kebijakan Pemerintah penundaan pembayaran hutang

Menurut Narita, (2012) Perusahaan dengan kriteria liquiditas tinggi memiliki kelebihan dalam menjamin pelunasan hutangnya

H2 : Liquiditas berpengaruh terhadap Kebijakan Pemerintah pada penundaan pembayaran hutang

1.2.3. Pengertian Dan Pengaruh Free Cash Flow terhadap Kebijakan Pemerintah penundaan pembayaran hutang

Menurut Husnan dan Enny (2012) Arus Kas Bebas Setelah perusahaan berinvestasi dalam aset tambahan atau tetap, arus kas dapat ditransfer kepada investor (baik pemegang saham dan pemegang obligasi), meningkatkan modal operasi yang diperlukan untuk menopang pertumbuhan perusahaan.

Rumus yang digunakan untuk FCF :

$$\text{Arus Kas Bebas} = \text{Arus Kas dari Operasi} - \text{Net Capital Service} - \text{Net Working Capital}$$

Pengaruh free cash flow terhadap kebijakan pemerintah penundaan pembayaran hutang

Arus kas bebas adalah kas yang ditransfer langsung ke kreditur maupun pemegang saham tanpa perlu modal kerja atau aset tetap (Tarjo, 2005). Penggunaan Free Cash Flow Harga saham naik karena pembayaran kepada pemegang saham meningkat.

H3: Free Cash Flow berpengaruh terhadap Kebijakan Pemerintah pada penundaan pembayaran hutang

1.2.4. Pengertian Dan Pengaruh Kebijakan Hutang terhadap Kebijakan Pemerintah penundaan pembayaran hutang

Menurut Ross, Westerfield, Jaffe dalam Nuraini (2015) kebijakan hutang perusahaan merupakan kemampuan perusahaan dalam membuat aturan tentang dana perusahaan yang digunakan dalam pembayaran hutang dibandingkan ekuitas. Formula untuk kebijakan hutang:

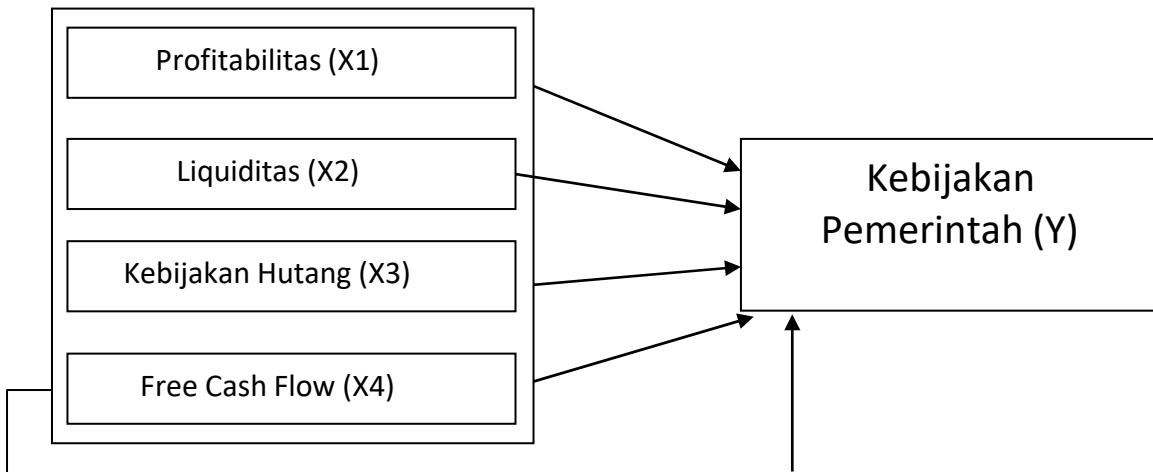
$$\text{Debt to Equity Ratio (DER)} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Modal}}$$

Pengaruh Kebijakan Hutang terhadap kebijakan pemerintah penundaan pembayaran hutang

Menurut Mamduh (2004), sebuah organisasi dianggap tidak aman jika ia memiliki tingkat pengaruh yang sangat besar dalam desain modalnya, namun bertentangan dengan norma dengan asumsi bahwa ia menggunakan hampir nol pengaruh menggunakan leverage tambahan dianggap tidak layak. bisnis organisasi.

H4: Kebijakan Hutang berpengaruh terhadap Kebijakan Pemerintah pada penundaan pembayaran hutang

1.3. Kerangka Konseptual



1.4. Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang disajikan yaitu:

- H1. Benefit secara keseluruhan berpengaruh terhadap Strategi Pemerintah pada Organisasi Food and Drink Area yang Tercatat di BEI Periode 2018-2020
- H2. Likuiditas pada dasarnya mempengaruhi Strategi Pemerintah pada Organisasi Bidang Makanan dan Minuman yang Tercatat di BEI Periode 2018-2020
- H3. Penghasilan gratis secara keseluruhan akan mempengaruhi pengaturan pemerintah terhadap organisasi di bidang makanan dan minuman yang tercatat di BEI dari 2018 hingga 2020.
- H4. Strategi Obligasi Secara fundamental mempengaruhi strategi pemerintah pada organisasi yang tercatat di food and refreshment area Periode BEI 2018-2020 Benefit, Likuiditas, Strategi Obligasi dan Free Income pada dasarnya mempengaruhi Strategi Pemerintah pada Organisasi Area Food and Drink Tercatat di BEI Periode 2018 - 2020.